

**LAPORAN KINERJA  
(LKj)**

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
Jl. A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. ( 0512 ) 21775**

# DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar		
Daftar Isi		
Ringkasan Eksekutif		
Bab I	Pendahuluan	
	A. Latar Belakang .....	1
	B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi .....	2
	C. Isu Strategis	
	D. Produk dan Layanan .....	10
	E. Sistematika Penyajian .....	11
Bab II	Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	
	A. Visi RPJM.....	13
	B. Misi RPJM .....	13
	C. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	13
	D. Indikator Kinerja Utama .....	17
	E. Perjanjian Kinerja .....	
	F. Program dan Kegiatan .....	18
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	
	A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	
	1. Eselon II ( Kepala Satuan ) .....	21
	2. Eselon III ( Sekretaris).....	21
	1 ) Eselon IV ( Kasubbag Perencanaan ) .....	22
	2 ) Eselon IV ( Kasubbag Keuangan ).....	22
	3 ) Eselon IV ( Kasubbag Umum Kepegawaian ).....	
	3. Eselon III ( Kepala Bidang )	
	1 ) Eselon IV ( Kasi Pembinaan dan Penyuluhan ) .....	23
	2 ) Eselon IV ( Kasi Penyidikan dan Penyelidikan ).....	23
	4. Eselon III (Ka.Bid Ketentraman dan Ketertiban Umum)	
	1) Eselon IV ( Kasi Pengendalian dan Penindakan ).....	23
	2) Eselon IV ( Kasi Pengamanan ).....	24
	5. Eselon III ( Kepala Bidang Pemadam Kebakaran )	
	1) Eselon IV ( Kasi Kesiapsiagaan ).....	24
	2) Eselon IV ( Kasi Kedaruratan ).....	24
	6. Eselon III ( Kepala Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat)	
	1) Eselon IV ( Kasi pembinaan dan pengawasan ).....	25
	2) Eselon IV ( Kasi Pelidungan Masyarakat ).....	25
	B. Akuntabilitas Keuangan	
	1. Anggaran dan Realisasi APBD 2019.....	46
	2. Anggaran dan Realisasi APBD 2020.....	49
Bab IV	Penutup	
	A. Kesimpulan .....	52
	B. Strategi Peningkatan Kinerja .....	52

## Lampiran

1. IKU
2. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 bertanda tangan
3. Cascading / Pohon Kinerja
4. Matrik Keselarasan



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk tahun anggaran 2020

Dalam penyelesaian Laporan Kinerja (Lkj) Tahun Anggaran 2020 ini tentunya tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak terkait khususnya di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sendiri yang telah ikut berpartisipasi dalam penyampaian dan penyempurnaan data yang diperlukan, semoga Laporan Kinerja (Lkj) Tahun Anggaran 2020 yang kami buat ini dapat bermanfaat bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sendiri maupun semua pihak yang memerlukannya

Kesempurnaan dalam setiap hasil adalah cita-cita kami, namun sebagai manusia biasa tentunya tidak terlepas dari keterbatasan yang ada. Untuk itu masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk kemajuan kita bersama

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi aktif dalam membantu mendukung penyusunan laporan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih

Pelaihari, Januari 2021

Ir. M. Faried Widyatmoko  
Nip. 19680929 199503 1 006

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. PP nomor 8 tahun 2008 tentang pelaporan keuangan pelaporan kinerja Permen Pan nomor 53/tahun 2015 juknis perjanjian kinerja. Hal ini merupakan bagian dari implimentasi SAKIP guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut terdiri 5 Esselon III, yaitu Sekretaris, Kepala Bidang Penegakan Perundang Undangan Daerah, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat dan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran. Sedangkan Esselon IV sejumlah 11 Jabatan ( 3 Kasubbag dan 8 Kasi).

Pengembangan dan pelaksanaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Tanah Laut merupakan upaya untuk mewujudkan **Visi** (*Tanah Laut yang Berinteraksi*) dan Misi Bupati Tanah Laut, **Misi (3)** Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Strategi pencapaian tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut secara umum menyesuaikan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023. Pengembangan dan pelaksanaan program/kegiatan urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan Renstra Tahun 2018-2023 berorientasi pada sasaran Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum; meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat;

Realisasi Anggaran Belanja Langsung (APBD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 dari Anggaran Rp. 9.248.656.329 terealisasi sebesar Rp. 8.570.675.130 (92,67%), Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (APBD) tahun 2020 dari Anggaran Rp. 5.800.981.876 terealisasi sebesar Rp. 4.559.495.627 (78,6 %).

Untuk masa mendatang, kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tanah Laut akan terus ditingkatkan, dengan melakukan beberapa hal, antara lain:

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur, melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun peningkatan strata pendidikan.
2. Meningkatkan fasilitas sarana/prasarana guna menunjang peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Melaksanakan Koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pengembangan rasa aman dan perlindungan masyarakat melalui berbagai upaya pengembangan ketaatan atas aturan dan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan di segala bidang dan sektor yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, bersama-sama dengan masyarakat secara partisipatif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat baik secara material maupun spiritual.

Pembangunan yang dilaksanakan tanpa memperhatikan pengembangan ketaatan atas aturan dan penegakan hukum akan melahirkan ketimpangan baik di dalam tataran pemerintahan sendiri, maupun di setiap bidang kehidupan masyarakat seperti sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, keamanan, ketentraman dan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang pada akhirnya sangat mengancam terhadap keinginan pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

Dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda) sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah pada pasal 209, 210, 211 dan 212 ayat (4) disebutkan Kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada. bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta pasal 255 dan 256 yang mengamanatkan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.

Dengan demikian keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mendapat posisi dan peranan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintah di Daerah. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah menegakkan Peraturan Daerah, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Maka untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah seluruh kegiatan tersebut harus dapat diukur. Dimana pengukuran tersebut tidak semata-mata

kepada input (masukan) dari program instansi tersebut , tetapi lebih ditekankan pada keluaran, proses, manfaat dan dampak dari program tersebut bagi kesejahteraan.

Dimana Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Tanah Laut pada prinsipnya adalah perwujudan dari pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam menyelenggarakan kebijakan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25).

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut ini merupakan kebutuhan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut sesuai prinsip good government dan clean government.

## **B. STRUKTUR ORGANISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut, maka susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Sebagai Berikut.

### **1.1. TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundangan lainnya, mengembangkan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta perlindungan masyarakat.

### **1.2. FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Dalam melaksanakan tugas pokok, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta kebijakan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-

- undangan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya dan perlindungan masyarakat;
- b. Penyusun rencana dan program kerja serta kebijakan pelaksanaan pembinaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan perlindungan masyarakat;
  - c. Pelaksanaan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat di Daerah;
  - d. Pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - e. Pelaksanaan pemeliharaan dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Daerah;
  - f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah, peraturan dan keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau aparatur lainnya;
  - g. Pelaksanaan pengembangan dan pembinaan personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan perlindungan masyarakat;
  - h. Pelaksanaan pengawasan dan penyuluhan dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, peraturan dan keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya dan perlindungan masyarakat;
  - i. Pelaksanaan operasional dilapangan dalam pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, pelanggaran peraturan daerah, peraturan dan keputusan Bupati serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, dan perlindungan masyarakat;
  - j. Pelaksanaan penyidikan, pemeriksaan, pengusutan dan pengajuan tuntutan terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, pelanggaran peraturan daerah, peraturan dan keputusan Bupati serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya;
  - k. Pembinaan administrasi dan organisasi serta penyelenggaraan ketatausahaan; dan
  - l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dibidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan

masyarakat, penegakan peraturan daerah, peraturan dan keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelaksanaan tugas-tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf l di atas meliputi :

- a. Mengikuti proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- b. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk pejabat pemerintah;
- c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan;
- d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu Kepala Desa, Kepala Daerah, Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden);
- e. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
- f. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.3. SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

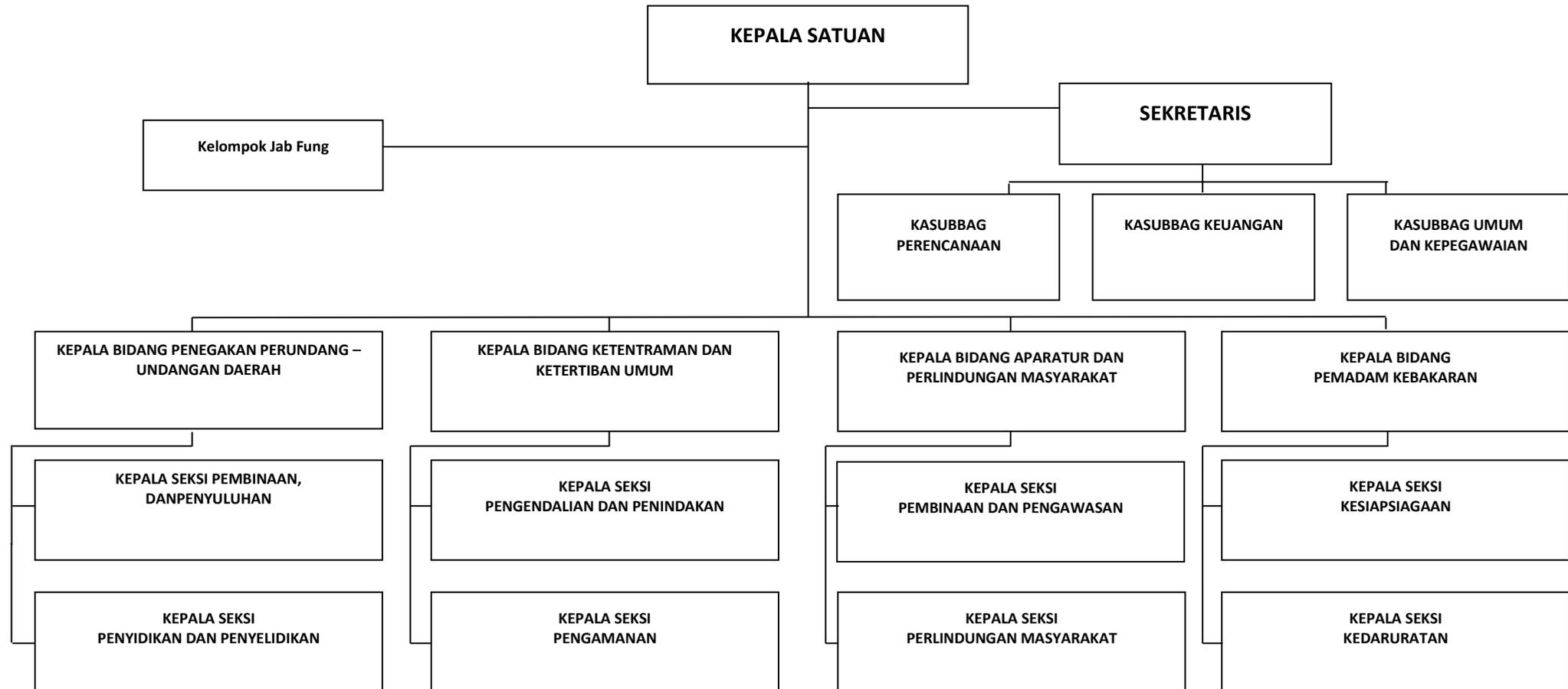
Unsur-unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- b. Sekretariat
  1. Sub Bagian Perencanaan
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan.
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari;
  1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
  2. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan
- d. Bidang dan Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari;
  1. Seksi Pengendalian dan Penindakan.
  2. Seksi Pengamanan.

- e. Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari;
  - 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
  - 2. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- f. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari ;
  - 1. Seksi Kesiapsiagaan.
  - 2. Seksi Kedaruratan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan bagan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**



## Aspek Strategis Organisasi

Pencapaian kinerja kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kelembagaan secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penunjang yang sangat terkait dengan sumber daya internal kelembagaan yaitu :

- Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki integrasi diri yang baik;
- Dukungan sarana prasarana penunjang kinerja yang andal;
- Dukungan anggaran yang proporsional dan berbasis kinerja;
- Serta system dan mekanisme internal yang baik.

Berdasarkan hal tersebut, pembahasan tentang kinerja pelayanan kelembagaan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat dari :

### 1. SUMBER DAYA MANUSIA

Kondisi sumber daya manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut sangatlah penting guna peningkatan terhadap keamanan dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tahun ini jumlah pegawai yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebanyak 215 (seratus tujuh puluh) orang diantaranya 42 orang Pegawai Negeri Sipil atau 19,53 % dan 173 orang Pegawai Tidak Tetap atau 80,47 %. Sebagaimana Tabel Berikut :

**Tabel :1.1**  
**Jumlah Pegawai Pergolongan / Pendidikan Tahun 2020**  
**Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

Golongan/Kepangkatan				Jlh	Pendidikan							Jlh
Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I		S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	
6	13	20	3	42	3	14		-	23		2	42

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian

## Jumlah PTT / Pendidikan Tahun 2020

### Pegawai Tidak Tetap (PTT)

Pendidikan						Jlh
S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	
13	3	-	157	-	-	173

Jika melihat pada penjelasan data kepegawaian tersebut diatas, terdapat beberapa kesimpulan yang penting untuk diperhatikan terkait dengan harapan peningkatan pencapaian kinerja kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut. Fakta atas kondisi tersebut jelas merupakan tantangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kedepan dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kelembagaan, dan hal tersebut juga membutuhkan terdapatnya berbagai strategi dan kebijakan serta progam dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia aparatur, sehingga dapat secara signifikan memberikan kontribusi maksimal bagi upaya peningkatan kinerja pelayanan kelembagaan.

#### 1. SARANA PRASARANA KELEMBAGAAN

Sarana prasarana kelembagaan merupakan salah satu instrumen penting penunjang kinerja kelembagaan, dimana ketersediannya jelas merupakan keniscayaan bagi peningkatan kinerja kelembagaan.

Secara umum kondisi sarana prasarana kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut sudah menempati bangunan baru yang berada disamping area kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Kondisi sarana kerja di kantor secara umum masih sangat kurang dan membutuhkan pengembangan yang secara rinci dapat terlihat sebagai table berikut :

**TABEL 1.3**  
**DAFTAR INVENTARIS BARANG**  
**SATPOL PP TAHUN 2019**

No	Jenis Barang	Jumlah (Volume)	Keadaan		Ket.	
			Baik	Rusak		
1.	Tanah bangunan kantor	400 M2	√	-	Tanah Pemda	
2.	Mobil	9 buah	√	1		
3.	Sepeda Motor merk Honda & Kawasaki	15 buah	√	-		
4.	Komputer PC			-		
5.	Laptop	17 buah	√	-		
6.	Printer	7 buah	√	-		
7.	Printer Fotocopy	8 buah	√	-		
8.	Mesin Tik Manual	2 buah	-	-		Dihapuskan
9.	Air Conditioner (AC)	13 buah	√	-		
10.	Mesin Genset	16 buah	√	2		
11.	Kulkas	1 buah	√	-		
12.	Kipas Angin	1 buah	√	-		Dihapuskan
13.	Faxmili	7 buah	√	3		
14.	Radio Reg	1 buah	√	-		
15.	Handy Talky	10 buah	√	-		
16.	Perisai	56 buah	√	-	Dihapuskan	
17.	Rompi Anti Peluru	1 buah	-	-		
18.	Tameng	65 buah	√	-	Dihapuskan	
19.	Tape Recorder	1 buah	-	-		
20.	Handy Camera	6 buah	√	-		
21.	LCD Proyektor	1 buah	√	-		
22.	Televisi	9 buah	√	1		

### C. Isu Strategis

Penentuan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum sangat dipengaruhi oleh konteks perencanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum pada skala nasional (pemerintah pusat). Hal tersebut guna meningkatkan konsistensi dan kesinambungan antara perencanaan di daerah dengan perencanaan pada hirarki struktur pemerintahan.

Ketenteraman dan keamanan sesungguhnya menjadi suatu isu strategis pembangunan nasional, sebagaimana ketenteraman, keamanan dan ketertiban di Kabupaten Tanah Laut juga menjadi isu dan permasalahan strategis daerah.

Persoalan stabilitas keamanan dan ketenteraman umum serta perlindungan masyarakat merupakan kebijakan strategis pemerintah perlindungan masyarakat merupakan kebijakan strategis pemerintah pusat dalam menjamin terlindunginya seluruh tumpah darah, rakyat Indonesia dan Bumi Nusantara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pengembangan keamanan dan ketenteraman umum bagi masyarakat ditujukan bagi tercapainya negara yang aman dan kondusif di atas dinamika sosial ekonomi, hukum dan politik yang demokratis dan transparan, sehingga kebebasan beraktivitas bagi masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Sementara dari sisi perlindungan masyarakat, arah kebijakan pembangunan nasional menempatkan aspek perlindungan atas hak asasi manusia (HAM) menjadi

bagian yang integral dalam pembangunan itu sendiri baik yang menyangkut sektor-sektor ekonomi, sosial, hukum dan politik serta sektor lainnya. perlindungan masyarakat juga dikonsentrasikan pada penjaminan hak-hak individu pada negara dan kebebasan berkehendak dalam iklim demokratisasi yang transparan serta penjamin kesetaraan setiap warga Negara di mata hukum.

Dari penjelasan atas hal tersebut sebagai suatu telaah atas hirarki perencanaan terkait Rencana Strategis (renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat disimpulkan bahwa pembangunan bidang keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat jelas bagian yang tidak terpisahkan dari konsep pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat dan daerah dengan bersama-sama masyarakat pada umumnya secara partisipatif.

#### **D. Produk dan Layanan**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Institusi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai kewenangan menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dituntut untuk mampu bertindak, memberikan penyuluhan / penjelasan kepada masyarakat bahkan wajib memberikan contoh kepada masyarakat sebagaimana disebut didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Sebagaimana Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 Adalah menghasilkan layanan sebagai berikut :

- a. Melakukan Penegakan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.
- b. Melakukan peningkatan pengawasan ketertiban umum di masyarakat
- c. Melakukan penanganan serta pencegahan dini terhadap bencana kebakaran.
- d. Melakukan pembinaan terhadap satlinmas

#### **Produk**

- a. Berkurangnya pelanggaran terhadap produk Hukum/Perda yang telah di Undangkan.
- b. Adanya ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat yang lebih kondusif.
- c. Tanggapnya masyarakat terhadap bahaya bencana kebakaran
- d. Terciptanya keamanan lingkungan di setiap perdesaan

## **E. Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian dan penulisan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 berpedoman pada surat sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor                    tanggal                    tentang penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sebagai berikut

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

Bab I        Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Produk dan Layanan
- E. Sistematika Penyajian

Bab II        Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- A. Visi RPJM
- B. Misi RPJM
- C. Tujuan dan Sasaran Strategis
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja
- F. Program dan Kegiatan

Bab III        Akuntabilitas Kinerja

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
  - 1. Eselon II ( Kepala Satuan )
  - 2. Eselon III ( Sekretaris )
    - 1 ) Eselon IV ( Kasubbag Umum Kepegawaian )
    - 2 ) Eselon IV ( Kasubbag Perencanaan )
    - 3 ) Eselon IV ( Kasubbag Keuangan )
  - 3. Eselon III ( Kepala Bidang Penegakan Perundang undangan Daerah )
    - 1 ) Eselon IV ( Kasi Pembinaan dan Penyuluhan )
    - 2 ) Eselon IV ( Kasi Penyidikan dan Penyelidikan )
  - 4 Eselon III ( Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum )
    - 1 ) Eselon IV ( Kasi Pengendalian dan Penindakan )
    - 2 ) Eselon IV ( Kasi Pengaman )
  - 5.. Eselon III ( Kepala Bidang Pemadam Kebakaran)

- 1 ) Eselon IV ( Kasi Kesiapsiagaan)
- 2 ) Eselon IV ( Kasi Kedaruratan )

5.Eselon III ( Kepala Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat )

- 1 ) Eselon IV ( Kasi Pembinaan dan Pengawasan )
- 2 ) Eselon IV ( Kasi Perlindungan Masyarakat )

**B. Akuntabilitas Keuangan**

1. Anggaran dan Realisasi Tahun 2019
2. Anggaran dan Realisasi Tahun 2020

Bab IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja

Lampiran

1. IKU
2. Cascading / Pohon Kinerja
3. Rencana Aksi
4. Matrik Keselarasan

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. VISI

Visi merupakan keadaan yang ingin diwujudkan pada akhir periode Renstra SKPD, sesuai dengan Tugas dan Fungsi yang sejalan dengan Pernyataan Visi Kepala Daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJM :

**“TERWUJUDNYA**

**TANAH LAUT YANG BERINTERAKSI”**

**(BERkarya, INovasi, TErtata, Religius, Aktual, dan Sinergi)**

### B. MISI

Misi RPJMD ada 5 yaitu :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat;
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan **Misi yang ke 3 yaitu: Membangun Tata Kelola pemerintahan yang baik ( Good Governance )**

### C. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam tahun 2018-2023. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Rencana Strategis adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram

2. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan
3. Terwujudnya tata pemerintahan yang berkualitas

#### D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu yang merupakan bagian dari proses perencanaan strategis.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan formulir sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada terkait ketertiban umum.
3. Menurunnya tingkat pelanggaran keamanan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Meningkatnya kualitas SDA Satlinmas dan penegakan Perda.
5. Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD

Sasaran Strategis yang telah dirumuskan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut sebagai sasaran Renstra adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Indikator tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Terwujudnya peningkatan kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram	Persentase peningkatan kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram	100%	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penegakan Perda dan Perkada	100 %
					Persentase penyelesaian gangguan dan ketentraman dan ketertiban umum	100%
					Persentase penanganan kebakaran pemukiman	100%
				Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada terkait ketertiban umum	- Persentase penegakan Perda dan Perkada terkait ketertiban Umum  - Resiko Penduduk terkena tindak Pidana ( per 100.000 orang )  - Jumlah Tindak Pidana ( kasus )	100%  90  100 Kasus
Menurunnya tingkat pelanggaran keamanan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran kamtrantibmas dibandingkan dengan persentase tahun	100%				

					sebelumnya	
2.	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	persentase peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat	100%	Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase kecamatan yang memiliki sarana prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standard	90%
					Persentase anggota Pemadam Kebakaran yang berkualitas	90%
				Meningkatnya kualitas SDA Satlinmas dan penegakan Perda	Persentase SDA Satlinmas dan penegakan Perda yang bersertifikat pengembangan satlinmas	85 %
					Persentase SDA yang mengikuti Diklat Pengembangan Aparatur	90%
3	Terwujudnya tata pemerintahan yang berkualitas	persentase tata kelola organisasi perangkat daerah	100%	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase Terkelolanya administrasi urusan umum dan kepegawaian	100 %
					Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun	100 %
					Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100 %
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	80

Tabel Realisasi Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan	Indikator tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya peningkatan kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram	Persentase peningkatan kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram	100%	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penegakan Perda/Perkada	100 %	100 %	100%
					Persentase penyelesaian gangguan dan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100 %	100%
					Persentase penanganan kebakaran pemukiman	100%	100 %	100%

				Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada terkait ketertiban umum	1. Persentase penegakan Perda dan Perkada terkait ketertiban Umum 2. Resiko Penduduk terkena Tindak Pidana ( per100.000 orang ) 3. Jumlah Tindak Pidana (Kasus )	100%  90  100	100 %  55  55	100%  61,11%  55 %
				Menurunnya tingkat pelanggaran keamanan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran kamtrantibmas dibandingkan dengan persentase tahun sebelumnya	100%	100 %	100%
2	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	persentase peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat	100%	Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase kecamatan yang memiliki sarana prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standard  Persentase anggota Pemadam Kebakaran yang berkualitas	90%  90%	75 %  90%	83,33%  100%
				Meningkatnya kualitas SDA Satlinmas dan penegakan Perda	Persentase SDA Satlinmas dan penegakan Perda yang bersertifikat pengembangan satlinmas Persentase SDA yang mengikuti Diklat Pengembangan Aparatur	85 %  90%	85%  50%	100%  55%
3	Terwujudnya tata pemerintahan yang berkualitas	persentase tata kelola organisasi perangkat daerah	100%	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase terkelolanya Administrasi Urusan umum dan Kepegawaian  Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun  Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan  Nilai akuntabilitas Instansi Pemerintah	100%  100 %  100 %  80 %	100%  100%  100%  75%	100%  100%  100%  93,75%

Tabel ( Tujuan, Indikator, Target, Indikator, Target 5 Tahun )

No	Tujuan	Indikator tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJM	Target Kinerja Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJM	
							2019	2020	2021	2022	2023		
1	Terwujudnya peningkatan kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram	Persentase peningkatan kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram	100%	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penegakan Perda/Perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					Persentase penyelesaian gangguan dan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					Persentase penanganan kebakaran pemukiman	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada terkait ketertiban umum	- Persentase penegakan Perda dan Perkada terkait ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					- Resiko Penduduk terkena tindak Pidana ( per 100.000 orang )	90	90	90	90	90	90	90	
					- Jumlah Tindak Pidana ( Kasus )	100	100	100	100	100	100	100	
				Menurunnya tingkat pelanggaran keamanan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran kamtrantibmas dibandingkan dengan persentase tahun sebelumnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	persentase peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat	100 %	Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase kecamatan yang memiliki sarana prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standard	90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%
					Persentase anggota Pemadam Kebakaran yang berkualitas	90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%
				Meningkatnya kualitas SDA Satlinmas dan penegakan Perda	Persentase SDA Satlinmas dan penegakan Perda yang bersertifikat pengembangan satlinmas	85%	85%	85%	85%	90%	100%	100%
					Persentase SDA yang mengikuti Diklat Pengembangan Aparatur	90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%
3	Terwujudnya tata pemerintahan yang berkualitas	persentase tata kelola organisasi perangkat daerah	100%	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase terkelolanya Administrasi urusan Umum dan Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD					100%		
				Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	80	80	80	80	85	85	85	

## E. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja

instansi pemerintah harus selaras antar unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Berikut Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan Sasaran Renstra :

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	TARGET
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penegakan Perda/Perkada	$\frac{\sum \text{Pelanggaran Perda / Perkada yang diselesaikan}}{\sum \text{Pelanggaran Perda / Perkada yang dilaporkan}} \times 100\%$	100%
	Persentase penyelesaian gangguan dan ketentraman dan ketertiban umum	$\frac{\sum \text{Gangguan tibumtranmas Yang diselesaikan}}{\sum \text{Gangguan tibumtranmas Yang dilaporkan}} \times 100\%$	100%
	Persentase penanganan kebakaran pemukiman	$\frac{\sum \text{Kebakaran pemukiman yang ditangani}}{\sum \text{Kebakaran pemukiman yang dilaporkan}} \times 100\%$	100%

## F. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

### A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Rapat rapat, konsultasi, dan koordinasi
2. Penyediaan jasa, bahan, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran
3. Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD

### B. Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana / Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
2. Pemeliharaan sarana dan Sarana Perkantoran
3. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur
4. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

### C. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD

1. Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan

### D. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD

1. Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD

### E. Program Pembinaan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Pemadam Kebakaran

1. Tanggap Darurat dan Pengendalian kebakaran
2. Deteksi Dini, Pencegahan dan Kesiapsiagaan kebakaran

### F. Program Pembinaan, Pengamanan dan Penegakan Perda

1. Penyelidikan, Penyidikan Perda, Pelayanan dan Pembinaan PPNS

2. Pembinaan, Pengawasandan Penyuluhan Perda/Perkada

### G. Program Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Pengamanan Kegiatan Pemerintah daerah

2. Pembinaan, Pengendalian dan Penindakan Kamtrantibmas

### H. Program Pembinaan Aparatur dan Perlindungan Masyarakat

1. Pembinaan Satlinmas

2. Pembinaan dan Pengawasan aparatur

### G. Perjanjian / Penetapan Kinerja Tahun 2020

Perjanjian / Penetapan kinerja adalah dokumen yang berupa pernyataan komitmen serta janji dalam mencapai target kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan suatu unit / organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya. Penetapan Kinerja juga menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tabel Perjanjian / penetapan Kinerja tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sbb :

No	Kinerja		Indikator Kinerja	Target
<b>Eselon 2</b>				
1	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1	Persentase penegakan perda dan perkada	100%
		2	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%
		3	Persentase penanganan kebakaran pemukiman	100%
<b>Eselon 3</b>				
1	Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada terkait ketertiban Umum	1. 2. 3.	Persentase Penegakan Perda dan Perkada terkait ketertiban Umum Resiko Penduduk Terkena tindak Pidana ( per 100.000 orang ) Jumlah tindak Pidana	100% 90 orang 100 Kasus
2	Menurunnya tingkat pelanggaran keamanan ketentraman dan ketertiban umum	1	Persentase penyelesaian gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
3	Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1. 2.	Persentase kecamatan yang memiliki Sarana & Prasarana sesuai standar Persentase anggota Damkar yang berkualitas	90% 90%
4	Meningkatnya kualitas SDA Satlinmas dan penegakan perda	1	Persentase Jumlah SDA Satlinmas yang memiliki sertifikat pengembangan Satlinmas	85%
		2	Persentase jumlah SDA yang mengikuti Diklat Pengembangan aparatur	90%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	1	Persentase terkelolanya urusan administrasi umum dan kepegawaian	100%
		2	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun	100%
		3	Persentase laporan keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%
		4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	80
<b>Eselon 4</b>				

9	Sosialisasi perda dan perkada	1	Jumlah penyuluhan perda dan perkada terkait ketentraman dan ketertiban umum	25 kali
		2	Jumlah pembinaan terkait keamanan dan ketertiban umum	25 Kali
		3	Jumlah pengawasan terhadap pelanggaran perda dan perkada terkait ketertiban umum	25 Kali
10	Menyelesaikan pelanggaran perda dan perkada terkait ketentraman dan ketertiban umum	1	Jumlah pelanggaran perda dan perkada yang terselesaikan	55 kasus
		2	Jumlah laporan pelanggaran perda dan perkada terkait keamanan dan ketertiban umum	55 Laporan
11	Melaksanakan patroli/penertiban dan razia keamanan lingkungan	1	Jumlah patroli/penertiban yang dilakukan	360 kali
		2	Jumlah razia yang dilakukan	150 kali
12	Melaksanakan pengamanan kegiatan pemda dan pengawasan	1	Jumlah pengawalan pejabat pemerintah	144 kali
		2	Jumlah pengamanan kantor/aset pemda	360 hari
13	Melaksanakan kesiapsiagaan bahaya kebakaran	1.	Jumlah sarpras damkar yang layak pakai dan sesuai standar	12 Item
		2.	Jumlah anggota Damkar yang terlatih dan bersertifikat	10 Orang
14	Melaksanakan penyuluhan pencegahan dan pengendalian kebakaran	1	Jumlah Penyuluhan Bahaya kebakaran	24 kali
15	Melaksanakan penanganan kebakaran	1	Jumlah kebakaran yang ditangani tuntas	140 kasus
16	Melaksanakan pelatihan SDA satlinmas		Anggota satlinmas yang memiliki Sertifikat	46 Orang
17	Melaksanakan pembinaan kompetensi SDA satpol PP dan Damkar	1	Jumlah anggota yang terlatih	161 Orang
		2	Jumlah anggota satuan polisi yang bersertifikat	46 Orang
18	Melaksanakan Pemenuhan dan Pemeliharaan asset kantor	1	Jumlah asset perkantoran yang terpenuhi dan terpelihara	22 jenis
		1		
19	Melaksanakan administrasi Perkantoran dan Kepegawaian	1	Jumlah dokumen administrasi perkantoran dan Kepegawaian	1 Dokumen
20	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	1	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	6 Dokumen
21	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	1	Jumlah dokumen laporan keuangan yang terselesaikan	20 Dokumen

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Akuntabilitas Kinerja SKPD

Akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah perwujudan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Adanya beberapa kegiatan yang mengalami perubahan karena menyesuaikan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dan kegiatan tersebut diusulkan dalam perubahan anggaran, sehingga ada beberapa kegiatan yang anggarannya mengalami perubahan dari Penetapan Kinerja Tahun 2020 yang telah disepakati dalam perjanjian antara pihak pertama (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran) dan Pihak Kedua (Bupati Tanah Laut).

Dalam mencapai sasaran, sesuai dengan Tugas Pokok, fungsi dan tata kerja satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran. Disini akan dijabarkan tupoksi yang disesuaikan dengan sasaran masing masing.

##### 1. Eselon II ( Plt Kasat )

Sasaran Starategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penegakan Perda/Perkada	100%	100%	100%
	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100%	100%	100%
	Persentase penanganan kebakaran pemukiman	100%	100%	100%

**Sasaran : Meningkatkan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.**

**Indikator 1 : Persentase penegakan Perda / Perkada**

Sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada Tahun 2019 dalam penuntasan pelanggaran perda telah tercapai/menangani pelanggaran 188 (seratus delapan puluh Delapan), dan didukung dengan Program Pengamanan dan Penertiban Perda dan Kegiatan Penegakan Perda dan Kebijakan Kepala daerah dan Pembinaan, Pengawasan

dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah.

Sedangkan pada Tahun 2020 Didukung dengan Program Pembinaan, Pengamanan dan Penegakan Perda dan Kegiatan Penyelidikan, Penyidikan Perda, Pelayanan dan Pembinaan PPNS dan Kegiatan Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Perda dan Perkada. Dengan pelanggaran 55 ( Lima puluh Lima ) kasus **dilaporkan** dan **ditangani selesai** sebanyak 55 ( Lima Puluh Lima), Jadi 100 %. Dengan pengelompokan kasus dibagi menjadi 3 bagian yaitu dengan data sebagai berikut:

Tahun	Sanksi Yustisial (Putusan Pengadilan)	Sanksi Syariah	Sanksi Non Yustisi
2019 (188 Kasus)	3 Kasus	44 Kasus	140 Kasus
2020 ( 55 Kasus)	-	50 Kasus	5 Kasus

Sumber data : Bidang Penegakan Perda 2020



Keg. Penyelidikan sanksi syariah



Keg. Pengecekan IMB

Untuk data Tahun 2020 dibandingkan dengan jumlah data yang terjadi di tahun 2019, terjadi penurunan pelanggaran Perda, penurunan jumlah pelanggar Perda tersebut dipengaruhi adanya Covid 19 ini, semua orang harus mematuhi 3 M ( Mencuci tangan, Memakai masker dan Menjaga jarak ) dan tidak Keluar kalau tidak perlu. Keadaan seperti ini perlu dipertahankan dan untuk mempertahankannya perlu ditingkatkannya pembinaan melalui kegiatan penyuluhan tentang Peraturan Daerah oleh Bidang Penegakan Perda yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

**Indikator 2 : Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.**

Sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat untuk tahun 2019 telah tercapai/menangani pelanggaran 100

(seratus) kasus dan didukung dengan Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan Pengendalian keamanan Lingkungan. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal dengan Kegiatan Pengamanan Kegiatan Pemerintah daerah, Kegiatan Pengendalian dan Penindakan Kantrantibmas.

Sedangkan pada Tahun 2020, didukung dengan Program Pembinaan Ketentraman dan ketertiban Umum dengan kegiatan Pengamanan kegiatan Pemerintah daerah dan kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Penindakan kantrantibmas. Dengan laporan 49 ( empat puluh sembilan) kasus **dilaporkan** dan **ditangani selesai** sebanyak 49 ( empat puluh sembilan ) kasus dengan pengelompokan kasus dibagi menjadi 4 bagian yaitu dengan data sebagai berikut:

Tahun	Miras/Nge Lem	Asusila	Anak Punk	Pengamen
2019 (100 Kasus)	48 Kasus	18 Kasus	29 Kasus	5 Kasus
2020 ( 49 Kasus)	27 Kasus	18 Kasus	2 Kasus	2 Kasus

Sumber data : Bidang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat



Kegiatan Razia Miras



Kegiatan Razia Pekat

Bila dibandingkan dengan jumlah data yang terjadi di tahun 2019, terjadi penurunan peristiwa tindak kriminal, penurunan jumlah tindak kriminal tersebut didukung dengan ditingkatkannya pengawasan berupa Patroli Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kabupaten Tanah Laut melalui kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Penindakan oleh Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

### **Indikator 3 : Persentase Penanganan Kebakaran Pemukiman.**

Sesuai tugas dan fungsi dalam Peningkatan Penanganan Bencana Kebakaran Pemukiman dalam penyelesaian Penanganan Kebakaran Pemukiman Tahun 2019 telah tercapai/menangani 27 ( dua Puluh Tujuh ) kasus dan didukung oleh Program Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran dengan kegiatan

Pengendalian Kebakaran.dan Kegiatan Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran.

Sedangkan pada Tahun 2020 didukung Program Pembinaan Kesiapsiagaan dan kedaruratan Pemadam Kebakaran dengan kegiatan Tanggap darurat dan Pengendalian Kebakaran dan Kegiatan Deteksi Dini , Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran. Dengan laporan 140 (seratus empat puluh) kejadian dilaporkan dan ditangani selesai sebanyak 140 ( seratus empat puluh ) kejadian dengan pengelompokan menurut wilayah kecamatan dengan data sebagai berikut:

Kecamatan	Jumlah Kejadian Th.	
	2019	2020
Kintap	1	17
Jorong	-	7
Batu Ampar	2	4
Pelaihari	10	42
Panyipatan	2	-
Takisung	2	29
Tambang Ulang	1	2
Bati-bati	6	31
Kurau	1	5
Bumi Makmur	1	1
Bajuin	1	2

Sumber data : Bidang Pemadam Kebakaran



Bila dibandingkan dengan jumlah kejadian yang terjadi di tahun 2019, terjadi kenaikan kejadian bencana kebakaran, kenaikan tersebut perlunya di tingkatkan sosialisasi dengan melalui kegiatan Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran oleh Bidang Pemadam Kebakaran.

## 2. Eselon III ( Sekretaris ),

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	1	Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan Kepegawaian	100%	100%	100%
	2	Persentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD yang tersusun	100 %	100%	100%
	3	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
	4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	80	75	93,75%

### **Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD**

#### **Indikator 1 : Persentase terkelolanya administrasi urusan Umum dan kepegawaian**

Indikator ini dimaksudkan untuk mendukung kegiatan yang berhubungan dengan Administrasi perkantoran yaitu dengan adanya sarana prasarana ATK, pelayanan makan minum rapat, pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana yang didukung dengan kebijakan pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan kegiatan tugas pokok dan fungsi yang pada Tahun 2019 telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya adalah :

- a. Kegiatan yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi tata kelola Kesekretariatan, Perkantoran, Perencanaan, Pencatatan, Inventaris, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, Pelayanan Tamu, Rapat-Rapat Koordinasi serta tugas lain terkait tugas dan fungsi
- b. Tata kelola administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan Daftar Urut Kependidikan (DUK), Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala, Pensiun, Kartu Pegawai, Karis/Karsu dan lainnya terkait tugas dan fungsi
- c. Kegiatan yang berkaitan dengan penunjang kinerja aparatur Satpol PP berupa Pakaian Kerja Lapangan serta pakaian khusus hari-hari tertentu untuk mendukung tugas di lapangan

Indikator ini didukung oleh kebijakan untuk pengadaan peralatan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung kegiatan tugas pokok satuan polisi

pamong praja dan damkar dan juga pemeliharaan asset baik gedung kantor maupun alat transportasi dan operasional.

**Indikator 2 : Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun**

Indikator ini dimaksudkan untuk mendukung kegiatan yang berhubungan dengan Perencanaan, pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan sampai dengan penyajian laporan baik berupa: Revisi terhadap Indikator Sasaran Renstra 2019-2023, Renja 2020, RKA 2020, DPA 2020, emonev, dan LKPJ Tahun 2020, dengan capaian jumlah Dokumen Laporan terealisasi 100%.

**Indikator 3 : Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai aturan**

Indikator ini dimaksudkan untuk mendukung kegiatan yang berhubungan dengan Laporan Keuangan, pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan sampai dengan penyajian laporan baik berupa: Laporan Capaian Kinerja selama 12 Bulan, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semesteran, Laporan Tahunan dan, dengan capaian jumlah Dokumen Laporan terealisasi 100%.

**Indikator 4 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD**

Indikator ini dimaksudkan untuk mendukung kegiatan yang berhubungan dengan Perencanaan, pelaksanaan dan Evaluasi yang dituangkan dalam laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD ditargetkan Nilai 80 memperoleh Nilai 75 ( Nilai BB) jadi 93,75 %.

Indikator ini didukung oleh kebijakan untuk pengadaan peralatan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung kegiatan tugas pokok satuan polisi pamong praja dan damkar dan juga pemeliharaan asset baik gedung kantor maupun alat transportasi dan operasional.

Tahun 2019, Untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan jumlah kegiatan sebanyak 12 (dua belas) dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 3.689.259.710,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.601.927.101,- atau 97,63%.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan jumlah 5 (lima) dengan jumlah Anggaran Rp 560.034.827 dan terealisasi 448.192.550,- atau 80,03 %.

- c. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.6.749.900,- dan terealisasi sebesar Rp.6.267.500,- atau 92,85 %.
- d. Program Kerjasama informasi dengan mass media dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.467.500,- atau 95.81%.

Tahun 2020, Untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan jumlah kegiatan sebanyak 3 (tiga) dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 4.392.448.626,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.136.482.940,- atau 94,17%.
- b. Program pemenuhan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja dan Kualitas SDM dengan jumlah 4 (empat) kegiatan dengan jumlah Anggaran Rp 1.795.436.923 dan terealisasi 1.559.993.100,- atau 86,89 %.
- c. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.19.998.200,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0 %.
- d. Program perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 13.930.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.780.800,- atau 98,92%.

a) Eselon IV ( Kasubbag Umum & Kepegawaian )

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target	Realisasi	%
Melaksanakan Pemenuhan dan Pemeliharaan aset Kantor	1	Jumlah asset Perkantoran yang terpenuhi dan terpelihara	37 Jenis	37 Jenis	100
Melaksanakan administrasi Perkantoran dan Kepegawaian	2	Jumlah Dokumen Administrasi perkantoran dan Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	100

Jumlah aset 37 Jenis yang terpenuhi dan terpelihara, dari sebagian pengadaan 2 (dua) buah mobil untuk memenuhi kegiatan bidang Damkar dan mobil untuk kegiatan pengawalan Pejabat Daerah serta penmabahan 1 (satu) sepeda motor trail untuk kegiatan patroli dan terpenuhi 100%. Untuk Administrasi perkantoran dan kepegawaian berjumlah 2 (Dua) Dokumen yaitu Duk dan IKM dan terpenuhi 100%.

b) IV ( kasubbag Perencanaan )

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target	Realisasi	%
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang tersusun	9 Dokumen	9 Dokumen	100

9 ( Sembilan ) Dokumen yang ada di Perencanaan Renstra, Renja, RKA, RKAP, DPA, DPAP, LAKIP, LKPJ DAN LPPD, untuk Dokumen Perencanaan ada 6 ( Enam ) Dokumen, berupa Renstra, Renja, RKA, RKAP, DPA dan DPAP, sedangkan Dokumen Evaluasi ada 3 ( Tiga ) yaitu LAKIP, LKPJ dan LPPD. Untuk Tahun 2020 semua Dokumen sudah tersusun.

Untuk Tahun 2019 dari 9 ( sembilan ) Dokumen Perencanaan Semuanya Sudah tersusun, jadi 100 %

c) Eselon IV ( Kasubbag Keuangan )

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target	Realisasi	%
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Keuangan	1	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	3 laporan	3 laporan	100%

Dari 3 ( Tiga ) Laporan Keuangan yaitu : laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Calk, semua tersusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk tahun 2019 ketiga laporan Keuangan itu juga tersusun sesuai dengan ketentuan, jadi 100 %

3. Eselon III ( Kabid Penegakan Perda )

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target	Realisasi	%
Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada terkait ketertiban Umum	1	Persentase Penegakan Perda dan Perkada terkait ketertiban Umum	100	100	100
	2	Resiko penduduk terkena tindak pidana ( per 100.000 orang )	90	55	61,11
	3	Jumlah tindak Pidana ( kasus )	100	100	100

**Sasaran : Meningkatkan Penegakan Perda dan Perkada terkait Ketertiban**

## Umum

Indikator 1: Persentase penegakan Perda dan Perkada terkait ketertiban umum

Indikator 2: Resiko penduduk terkena tindak Pidana ( per 100.000 orang )

Indikator 3: Jumlah Tindak Pidana ( kasus )

Indikator kinerja sasaran strategis Persentase penyelesaian pelanggaran Perda pada tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Laut menargetkan kinerja sebesar 100%, kemudian pada pelaksanaannya mampu mencapai realisasi kinerja sebesar 100%, hal ini terjadi karena Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Laut mampu menyelesaikan pelanggaran Perda sebanyak 55 pelanggar dari sejumlah laporan yang masuk sebesar 55 laporan. Sehingga pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Laut dalam persentase penyelesaian pelanggaran Perda adalah sebesar 100% dalam kategori sesuai target. Dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah pelanggaran perda yang di selesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran perda yang dilaporkan}} \times 100\%$$

NO	Uraian	Jumlah Pelanggaran Perda yang dilaporkan	Jumlah Pelanggaran Perda yang diselesaikan	Keterangan
1	Sanksi Yustisial (Putusan Pengadilan)	-	-	
2	Sanksi Syariah	50 kasus	50 kasus	100%
3	Sanksi Non Yustisi	5 kasus	5 kasus	100%

Tahun 2019, Program yang mendukung indikator 1 adalah program Pengamanan dan ketertiban Perda, dengan Kegiatan Penegakan Perda dan kebijakan Kepala daerah jumlah Anggaran Rp 125.990.000 dan realisasi sebesar Rp 83.587.000 atau sekitar 66,34 %.

dan Kegiatan Pembinaan , Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Perundang undangan Daerah dan kebijakan Kepala Daerah jumlah Anggaran Rp 85.478.950 terealisasi sebesar Rp 80.939.000 atau sekitar 94,67 %.

Tahun 2020, ditambah 2 indikator yaitu indikator yang ada di RPJMD. Program yang mendukung indikator 1, 2 dan 3 pada tahun 2020 adalah program Pembinaan, Pengamanan dan Penegakan Perda, dengan Kegiatan Peyelidikan, Penyidikan Perda, Pelayanan dan Pembinaan PPNS jumlah Anggaran Rp 108.659.180 dan realisasi sebesar Rp 82.341.820 atau sekitar 75,78 %.

dan Kegiatan Pembinaan , Pengawasan dan Penyuluhan Perda / Perkada jumlah Anggaran Rp 73.705.600 dan realisasi sebesar Rp 72.170.000 atau sekitar 97,92 %.

a ) Eselon IV ( Kasi Pembinaan dan penyuluhan )

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Sosialisasi Perda dan Perkada	1 Jumlah Penyuluhan Perda / Perkada terkait ketentraman dan Ketertiban Umum	48	48	100
	2 Jumlah Pembinaan terkait keamanan dan ketertiban umum	18	18	100
	3 Jumlah Pengawasan terhadap pelanggaran perda dan perkada terkait keamanan dan ketertiban umum	96	90	93,75

Hambatan :

- Adanya tuntunan masyarakat terhadap kecepatan pelayanan oleh aparat, namun kemampuan dan kelengkapan operasi yang masih belum memadai dan ditambah dengan adanya Covid-19 ini sehingga mengalami kendala dalam pelaksanaannya.
- Dalam pembinaan terkait keamanan dan ketertiban umum dalam memberikan penyuluhan maupun bimbingan kepada masyarakat terkendala dari kesadaran akan masyarakat itu sendiri, karena para anggota sudah berupaya dalam berpartisipasi dalam kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan warga terhadap peraturan daerah.
- Dalam hal pengawasan sarana dan prasarana pendukung dalam teknis operasional untuk pembinaan keamanan dan ketertiban didasari karena penurunannya tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

Solusi :

- Perlunya penanganan pelanggaran terkait ketentraman dan ketertiban peraturan daerah di wilayah yang sama dan pada wilayah yang berbeda ditangani oleh Polisi Pamong Praja tingkat kecamatan dibawah komando.
- Untuk keberhasilan dalam kegiatan suatu lembaga tidak mungkin terwujud tanpa adanya dukungan oleh kesadaran masyarakat itu sendiri untuk keamanan dan ketertiban peraturan daerah maka dari itu perlunya kerja sama dengan instansi-instansi terkait dalam penanganan pembinaan peraturan daerah didasari hukum yang berlaku.
- Perlunya dikukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sesuai ruangan lingkup dan beban tugas. Sehingga diperlukanya kelengkapanya, personil dan mobilitas serta anggaran yang memadai agar dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bisa optimal.

b) Eselon IV ( kasi Penyidikan dan Penyelidikan )

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target	Realisasi	%
Menyelesaikan Pelanggaran Perda / Perkada terkait keamanan dan ketertiban umum	1	Jumlah Pelanggaran Perda / Perkada yang diselesaikan	55	55	100
	2	Jumlah laporan pelanggaran perda / Perkada terkait keamanan dan ketertiban	55	55	100

Hambatan :

- Masih banyaknya terjadinya pelanggaran Perda yang dilakukan oleh masyarakat atau badan hukum
- Masih kurangnya tenaga PPNS dalam rangka penegakan hukum dari perda itu sendiri
- Masih kurangnya sosialisasi tentang Perda yang ada lingkup Tanah Laut yang memuat sanksi

Solusi :

- Perlunya Pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan sanksi perda yang ada
- Perlunya penambahan tenaga PPNS untuk penegakan hukum
- Perlunya peningkatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh si pengusung perda itu sendiri agar masyarakat atau badan hukum lebih memahami

4. Eselon III ( Kabid Ketentraman dan ketertiban umum )

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target	realisasi	%
Menurunnya Tingkat pelanggaran keamanan , ketentraman , ketertiban Umum	1	Persentase Penyelesaian gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum	100 %	100%	100

**Sasaran : Menurunnya Tingkat Pelanggaran Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum**

**Indikator 1 : Persentase penyelesaian gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Indikator kinerja sasaran strategis Persentase penyelesaian kasus pelanggaran kamtrantibmas dibandingkan dengan persentase tahun sebelumnya pada

tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Laut menargetkan kinerja sebesar 100%, kemudian pada pelaksanaannya mampu mencapai realisasi kinerja sebesar 100%, hal ini terjadi karena Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Laut mengalami penurunan dalam hal penyelesaian kasus pelanggaran kamtrantibmas dibandingkan dengan jumlah kasus pelanggaran di tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 sebanyak 100 kasus dan pada tahun 2020 sebanyak 49 kasus , Dengan rumus :

$$\frac{\text{Tahun (n)} - \text{Tahun (n - 1)}}{\text{Tahun (n)}} \times 100\%$$

NO	URAIAN KASUS PELANGGARAN	JUMLAH PELANGGARAN		JUMLAH YANG DI TANGANI		KETERANGAN
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	Miras / Nge Lem	48	27	48	27	
2	Asusila	18	18	18	18	
3	Anak Punk	29	2	29	2	
4	Pengamen	5	2	5	2	
	Jumlah	100	49	100	49	

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan kegiatan :

1. Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.042.459.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.014.789.000,- atau 97,35 %.
2. Pengendalian dan Penindakan Kantrantibmas dengan Anggaran Rp. 401.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 233.846.000,- atau 58,26 %.

Dan Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan kegiatan :

1. Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Anggaran Rp 494.996.000 dan realisasi sebesar Rp 443.285.000 atau 89,55 %

Nilai capaian tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 Indikator Sasaran yaitu Persentase penyelesaian kasus pelanggaran kamtrantibmas dibandingkan dengan persentase tahun sebelumnya.

Tahun 2020, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan :

3. Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 859.844.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 850.813.500,- atau 98,95 %.
4. Pembinaan, Pengendalian dan Penindakan Kantrantibmas dengan Anggaran Rp. 562.570.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 493.305.000,- atau 87,69 %.

Nilai capaian tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 Indikator Sasaran yaitu Persentase penyelesaian kasus pelanggaran kamtrantibmas dibandingkan dengan persentase tahun sebelumnya.

**Tujuan Sasaran 3 :**

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendukung terciptanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

**Hambatan Sasaran 3 :**

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah :

- Wilayah kerja yang luas sehingga menyulitkan dalam memantau dengan sarana dan prasarana yang terbatas serta personil yang masih kurang di tiap-tiap kecamatan.

**Solusi Sasaran 3 :**

Solusi / upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan / hambatan tersebut adalah :

- Melakukan koordinasi dan evaluasi dengan pihak aparat desa / kecamatan terhadap titik pantauan pelanggaran.
- Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat umum.

a) Eselon IV ( Pengendalian dan Penindakan )

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target	realisasi	%
Melaksanakan Patroli / Penertiban dan Razia Keamanan Lingkungan	1	Jumlah Patroli /penertiban yang dilakukan	360 kali	360 kali	100
	2	Jumlah Razia yang dilakukan	150 kali	150 kali	100

Hambatan :

Kurangnya sarana prasarana dan alat pelindung diri untuk melakukan kegiatan di lapangan.

Solusi :

Perlunya peningkatan pengembangan sumber daya manusia dan terpenuhinya peningkatan sarana prasarana razia.

b) Eselon IV ( Kasi Pengamanan )

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran	Target	realisasi	%
Melaksanakan Pengamanan Kegiatan Pemda dan Pengawasan	1	Jumlah Pengawasan Pejabat pemerintah	144 kali	144 kali	100
	2	Jumlah Pengaman kantor/ asset daerah	360 kali	360 kali	100

Hambatan :

Tidak adanya portal tamu-tamu yang masuk lokasi pengawasan pengamanan asset.

Solusi :

Perlunya disiapkan portal untuk masuk lokasi pengawasan pengamanan asset.

5. Eselon III ( Kabid Pemadam Kebakaran )

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kesiap siagaan dan pencegahan bahaya Kebakaran	1	Persentase kecamatan yang memiliki sarana prasarana pemadam kebakaran sesuai standard	90%	75%	83,33
	2	Persentase anggota damkar yang berkualitas	90%	90%	100%

**Sasaran 4 : Meningkatkan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran**

**Indikator 1 : Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan Prasarana Pemadam kebakaran**

No	Uraian	2019	2020	Keterangan
1	Jumlah Kecamatan	11	11	
2	Jumlah Kecamatan yang memiliki Sarana dan prasarana pemadam kebakaran sesuai standar	-	4	
		-	4	

Tahun 2020, belum ada Pos Pemadam kebakaran sektor Kecamatan, baik personilnya maupun unit Pemadam Kebakaran, Pemadam kebakaran bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja baru Tahun 2017, jadi untuk Personelnya masih sedikit dan sarana dan Prasarannya juga masih sangat minim

Hambatannya

Apabila terjadi Kebakaran di kecamatan, maka akan terjadi keterlambatan penanganan kebakaran baik pemukiman / karhutra

Solusinya

Setiap Kecamatan harus ada Pos Pemadam Kebakaran sector Kecamatan , masing masing lengkap

Dengan personil dan Mobil unit Pemadam Kebakaran dan Peralatan pemadam Kebakaran Lainnya

**Indikator 2 : Persentase anggota Pemadam kebakaran yang berkualitas**

No	Uraian	2019	2020	Keterangan
1	Jumlah Pemadam Kebakaran	24 orang	24 orang	
2	Jumlah Pemadam Kebakaran yang Mengikuti Diklat	10 orang	10 orang	
		41,67 %	41,67 %	

Tahun 2018 ,

4 orang Anggota Pemadam Kebakaran diikutkan Diklat damkar di Riau

Tahun 2019,

6 orang Anggota Pemadam Kebakaran diikutkan Diklat Damkar di Prov Kal Sel

**Hambatannya :**

Masih sebagian besar Anggota Pemadam Kebakaran belum mengikuti Diklat damkar, sedangkan tugas tugas di Damkar sangat Komplet dan bersifat Emergency.

**Solusinya :**

Wajib semua Anggota Pemadam kebakaran untuk dapat mengikuti Diklat damkar I dan Diklat perjenjangan seterusnya guna dapat melaksanakan Tugas tugas kedinasan damkar dengan baik dan Selamat.

SKPD wajib mengalokasikan Anggaran untuk Peningkatan SDA Anggota Damkar melalui Diklat Diklat ke damkaran dan evakuasi.

Untuk 2019 untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran dengan kegiatan :

1. Pengendalian Kebakaran dengan Anggaran Rp. 121.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 108.662.500,- atau 89,43 %.
2. Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran dengan Anggaran Rp. 81.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 75.045.000,- atau 92,65 %.

Untuk 2020 untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Pembinaan Kesiapsiagaan dan kedaruratan Pemadam Kebakaran dengan kegiatan :

1. Tanggap darurat dan Pengendalian Kebakaran dengan Anggaran Rp. 130.375.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 130.045.000,- atau 99,75%.
2. Deteksi Dini, pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dengan Anggaran Rp. 678.375.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 665.398.170,- atau 98,09 %.

Nilai capaian tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 2 Indikator Sasaran, yaitu :

1. Persentase kecamatan yang memiliki sarana prasarana pemadam kebakaran sesuai standard
2. Persentase anggota damkar yang berkualitas

Tujuan Sasaran 5 :

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan peningkatan penanganan bencana kebakaran pemukiman.

Sesuai dengan laporan di lapangan terkait kejadian kebakaran pemukiman sebanyak 140 laporan. Dari jumlah tersebut telah di tindak lanjuti sebanyak 140 kejadian serta telah dinyatakan tuntas.

a ) Eselon IV ( kasi Kesiapsiagaan )

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target	Realisasi	%
Melaksanakan kesiapsiagaan bahaya kebakaran	1	Jumlah sarana dan prasarana damkar yang sesuai standar	8 Item	8 Item	100
	2	Jumlah anggota Damkar yang terlatih	60 orang	0 orang	0
Melaksanakan Penyuluhan , pencegahan dan pengendalian kebakaran	3	Jumlah penyuluhan bahaya kebakaran	7 Kali	0 Kali	0

Hambatan :

- Adanya pandemi Covid;19 tidak bisa dilaksakanya pelatihan Anggota Pemadam Kebakran
- Adanya Pandemi Covid-19 pada kegiatan penyuluhan bahaya kebakaran tidak bisa dilaksanakan.

Solusi :

- Kegiatan Pelatihan tersebut bisa dilaksanakan dengan melakukan Protokol Kesehatan, akan tetapi anggaran tersebut pada perubahan dilakukan revocusing.
- Kegiatan Penyuluhan bahaya Kebakaran tersebut bisa dilaksanakan dengan melakukan Protokol Kesehatan, akan tetapi anggaran tersebut pada perubahan dilakukan revocusing.

b ) Eselon IV ( Kasi Kedaruratan )

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target	Realisasi	%
Melaksanakan Penanganan Kebakaran	1	Jumlah kebakaran yang ditangani	140 Kasus	140 Kasus	100

Hambatan :

- Mobil Pemadam Kebakaran sering rusak
- Alat Pelindung Diri (APD) kebakaran kuranga / tidak lengkap sehingga kurangnya terpenuhi saat terjadi kebakaran.
- Kurangnya Personil Anggota Pemdarn Kebakaran.

Solusi :

- Perlunya Perbaikan Mobil secara berkala
- Perlunya pengadaan perlengkapan pendukung di lapangan

- Perlu nya penambahan Anggota Pemadam Kebakaran

6. Eselon III ( Kabid. Aparatur dan Perlindungan Masyarakat )

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%	
Meningkatnya kualitas SDA Satlinmas dan penegakan perda	1	Persentase SDA satlinmas yang memiliki sertifikat	85%	85%	100%
	2	Persentase Jumlah SDA Satpol PP yang mengikuti diklat	90%	90%	100%

**Sasaran : Meningkatnya Kualitas SDA Satlinmas dan Penegakan Perda**

**Indikator 1 : Persentase SDA Satlinmas yang memiliki Sertifikat**

Sesuai tugas dan fungsi dalam Peningkatan kualitas SDA Satlinmas Tahun 2020 bidang Sumberdaya Aparatur telah melakukan kerjasama dengan para Kepala Desa yang ada di beberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten Tanah Laut dengan menyediakan Personil dari Satpol PP dan Damkar untuk ditugaskan menjadi Instruktur guna melatih Satlinmas yang ada di Desa-Desa. Dalam pemenuhan pencapaian kegiatan pada Program Pembinaan Aparatur dan Perlindungan masyarakat dilakukan kerjasama dengan para Kepala Desa untuk dianggarkan di Kegiatan ADD di beberapa desa yang ada di Kecamatan. kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Kecamatan	Desa	Jumlah Peserta
Pelaihari	20	145
Bajuin	9	7
Tambang Ulang	9	11
Kurau	11	114
Bumi Makmur	10	4
Bati-Bati	14	2
Takisung	10	12
Panyipatan	10	8
Batu Ampar	14	17
Jorong	11	0
Kintap	14	61
Jumlah	135	381

Sumber data : Bidang Sumberdaya Aparatur



Sesuai dengan rencana Pelatihan Tahun 2020 untuk diklat teknis yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan Anggota Satlinmas oleh Pihak terkait terdapat sejumlah peserta sebanyak 381 orang dengan persentase pelatihan telah terealisasi 100% yang dilaksanakan beriringan dengan kegiatan Manunggal tuntung Pandang di Desa Desa yang ada di Kabupaten Tanah Laut.

#### **Indikator 2 : Persentase Jumlah SDA Satpol PP yang mengikuti diklat**

Berdasarkan anggaran yang ada pada satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut yang pada tahun 2020 menganggarkan kegiatan diklat kesamaptaan yang memang dilaksanakan secara bertahap dikarenakan keterbatasan anggaran telah diikuti sebanyak 46 orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai target dan anggaran yang dimiliki.

Tahun 2019, Untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pengembangan Kapasitas Aparatur dengan Anggaran Rp.154.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 98.390.000,- atau 63,60%.
2. Penyediaan Jasa Penunjang kinerja SKPD Anggaran Rp 3.142.779.960 realisasi Rp 3.089.778.340 atau 98,31 %.

Tahun 2020, Untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Pembinaan aparatur dan Perlindungan masyarakat dengan kegiatan :

1. Pembinaan Satlinmas dengan Anggaran Rp.441.232.000,- dan terealisasi sebesar Rp.414.350.000,- atau 93,91%.
2. Pembinaan dan Pengawasan Aparatur dengan anggaran Rp 172.080.000 realisasi Rp 151.994.800 atau 88,33 %.

Nilai capaian tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 2 Indikator Sasaran, yaitu :

1. Persentase Jumlah SDA satlinmas yang memiliki sertifikat.
2. Persentase Jumlah SDA Satpol PP yang mengikuti diklat.

**Tujuan Sasaran 4 :**

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kompetensi kualitas SDM Satlinmas melalui pendidikan dan pelatihan.

Hambatan Sasaran 4 :

Untuk Tahun 2020 dengan adanya Covid 19 untuk Pelatihan dan Pendidikan kegiatannya ditiadakan.

a ) Eselon IV ( Kasi Pembinaan dan Pengawasan )

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target	Realisasi	%
Melaksanakan Pembinaan Kompetensi SDA	1	Jumlah Anggota yang terlatih	161 orang	0 orang	100
	2	Jumlah Anggota yang bersertifikat	46 orang	0 orang	100

Hambatan :

- Untuk anggota Satpol Ppdan Damkar tidak bisa dilaksanakan karena Pandemi Covid-19

Solusi :

- Bisa dilaksanakan kegiatan tersebut dengan melalui Protokol kesehatan, akan tetapi untuk di perubahan di alakukan Refocusing.

b ) Eselon IV ( Kasi Perlindungan Masyarakat )

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target	Realisasi	%
Melaksanakan Pelatihan SDA Satlinmas	1	Anggota satlinmas yang memiliki Sertifikat	381 orang	0 orang	0

Hambatan :

- Karena belum ada regulasi/ aturan yang menyatakan bahwa Anggota Satlinmas wajib memiliki sertifikat.

Solusi :

- Ditegaskan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah terkait penegasan terhadap aturan tersebut.

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

### a. Anggaran dan Realisasi tahun 2019

Tahun 2019 (Setelah Perubahan), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang di tuangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar Rp. 13.049.831.457,- yang terdiri dari :

- **Belanja Tidak Langsung : Rp. 6.279.493.070,-**

Jumlah belanja tidak langsung jumlah ini dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai.

#### Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Gaji	2.471.850.600,-	1.940.507.200,-	78,49
2	Tunjangan Keluarga	370.777.590,-	233.692.482,-	63,03
3	Tunjangan Jabatan	217.045.500,-	167.754.638,-	77,27
	Tunjangan Fungsional umum	89.008.500,-	66.730.000,-	74,97
	Tunjangan Beras	181.095.880,-	124.055.460,-	68,50
	Tunjangan PPh/Tunjangan khusus			
	Pembulatan Gaji	9.500.000,-	5.883.777,-	61,93
	Tunjangan Penghasilan PNS berbasis kinerja	2.940.000.000,-	2.522.144.180,-	85,78
	Total	6.279.493.070,-	5.060.797.981,95,-	80,57

- **Belanja Langsung : Rp. 6.770.338.387,-**

Jumlah belanja langsung tahun anggaran 2019 setelah ditetapkan sebesar Rp. 6.770.338.387,- jumlah ini dipergunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan Pengawasan, Penertiban dan Penegakan Perda/Perkada yang terdiri atas 8 (delapan) Program dan 27 (dua puluh tujuh) Kegiatan. Berikut adalah Realisasi Belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 :

Tabel Anggaran dan Realiasi berdasarkan Program yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019:

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	REALISASI %
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.</b>	<b>3.689.259.710,00</b>	<b>3.601.927.101,00</b>	<b>97,63</b>
	1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	68.000.000,00	59.805.116,00	87,95
	2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	16.715.000,00	9.746.600,00	58,31
	3) Penyediaan Jasa administrasi keuangan	7.200.000,00	2.611.500,00	36,27
	4) Penyediaan Jasa kebersihan kantor	10.344.800,00	5.830.000,00	56,36
	5) Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	10.350.000,00	3.120.000,00	30,14
	6) Penyediaan jasa alat tulis kantor	33.434.100,00	33.323.400,00	99,67
	7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.999.850,00	8.609.300,00	95,66
	8) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	6.930.000,00	5.006.600,00	72,25
	9) Penyediaan makanan dan minuman	11.506.000,00	11.475.000,00	99,73
	10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	335.000.000,00	334.901.245,00	99,97
	11) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	38.000.000,00	37.720.000,00	99,26
	12) Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	3.142.779.960,00	3.089.778.340,00	98,31
<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>560.034.827,00</b>	<b>448.192.550,00</b>	<b>80,03</b>
	1) Pembangunan gedung kantor	95.939.830,00	95.035.000,00	99,06
	2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor	11.068.900,00	9.150.000,00	82,66
	3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	364.754.000,00	260.135.550,00	71,32
	4) Rehabilitas sedang/berat gedung kantor	71.800.097,00	70.400.000,00	98,05
	5) Rehabilitas sedang/berat kendaraan dinas/operasional	16.472.000,00	13.472.000,00	81,79
<b>III.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>6.749.900,00</b>	<b>6.267.500,00</b>	<b>92,85</b>
	1) Penyusun laporan capaian kinerja dan ikhisar realisasi kinerja SKPD	6.749.900,00	6.267.500,00	92,85
<b>IV.</b>	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>494.996.000,00</b>	<b>443.285.000,00</b>	<b>89,55</b>
	1) Pengendalian keamanan lingkungan	494.996.000,00	443.285.000,00	89,55
<b>V.</b>	<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	<b>1.598.559.000,00</b>	<b>1.347.025.000,00</b>	<b>84,26</b>
	1) Pengamanan kegiatan pemerintah daerah	1.042.459.000,00	1.014.789.000,00	97,35

	2) Pengendalian dan penindakan kantrantibmas	401.400.000,00	233.846.000,00	58,26
	3) Pengembangan kapasitas aparatur	154.700.000,00	98.390.000,00	63,60
<b>VI.</b>	<b>Program Pengamanan dan Penertiban Perda</b>	<b>211.488.950,00</b>	<b>164.526.000,00</b>	<b>77,79</b>
	1) Penegakkan Perda dan Kebijakan Kepala Daerah	125.990.000,00	83.587.000,00	66,34
	2) Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan peraturan perundang – undangan daerah dan kebijakan kepala daerah	85.498.950,00	80.939.000,00	94,67
<b>VII.</b>	<b>Program Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran</b>	<b>202.500.000,00</b>	<b>183.707.500,00</b>	<b>90,72</b>
	1) Pengendalian Kebakaran	121.500.000,00	108.662.500,00	89,43
	2) Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran	81.000.000,00	75.045.000,00	92,65
<b>VIII.</b>	<b>Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>6.467.500,00</b>	<b>95,81</b>
	1) Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6.750.000,00	6.467.500,00	95,81
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.770.338.387,00</b>	<b>6.201.398.151,00</b>	<b>91,60</b>

**b. Anggaran dan Realisasi tahun 2020**

Tahun 2020 (Setelah Perubahan), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang di tuangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar Rp. 15.049.638.205,- yang terdiri dari :

- **Belanja Tidak Langsung : Rp. 5.800.981.876,-**

Jumlah belanja tidak langsung jumlah ini dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai.

**Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2020**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Gaji	2.357.943.130,-	1.945.118.600,-	82,49
2	Tunjangan Keluarga	389.316.470,-	229.603.536,-	58,98
3	Tunjangan Jabatan	227.897.775,-	150.710.000,-	66,13
	Tunjangan Fungsional umum	93.458.925,-	67.420.000,-	72,14
	Tunjangan Beras	190.150.674,-	119.637.840,-	62,92
	Tunjangan PPh/Tunjangan khusus	9.975.000,-	4.599.250,-	46,11
	Pembulatan Gaji	225.750,-	22.947,-	10,16
	Tunjangan Penghasilan PNS berbasis kinerja	2.532.014.152,-	2.042.383.454,-	80,66
	<b>Total</b>	<b>5.800.981.876,-</b>	<b>4.559.495.627,-</b>	<b>78,6</b>

- **Belanja Langsung : Rp. 9.248.656.329,-**

Jumlah belanja langsung tahun anggaran 2020 setelah ditetapkan sebesar Rp. 9.248.656.329,- jumlah ini dipergunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan Pengawasan, Penertiban dan Penegakan Perda/Perkada yang terdiri atas 8 (delapan) Program dan 17 (tujuh belas) Kegiatan. Berikut adalah Realisasi Belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 :

Tabel Anggaran dan Realiasi berdasarkan Program yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020:

**REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

**KABUPATEN TANAH LAUT**

<b>No.</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>4.392.448.626.</b>	<b>4.136.482.940</b>	<b>94,17</b>
1.	Penyediaan Rapat rapat, konsultasi, dan koordinasi	399.625.798	387.752.049	97,03
2.	Penyediaan jasa, bahan, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	250.555.100	160.201.611	63,94
3.	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	3.742.267.728	3.588.529.280	95,89
<b>II</b>	<b>Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana / Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>	<b>1.795.436.923</b>	<b>1.559.993.100</b>	<b>86,89</b>
4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	1.009.300.000	983.483.000	97,44
5.	Pemeliharaan sarana dan Sarana Perkantoran	501.137.025	321.320.100	64,12
6.	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	0	0	0
7.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	284.999.898	255.190.000	89,54
<b>III</b>	<b>Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD</b>	<b>19.998.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan	19.998.200	0	0
<b>IV</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD</b>	<b>13.930.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD	13.930.800	0	0
<b>V</b>	<b>Program Pembinaan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Pemadam Kebakaran</b>	<b>808.750.500</b>	<b>795.443.170</b>	<b>98,35</b>

10.	Tanggap Darurat dan Pengendalian kebakaran	130.375.000	130.045.000	99,75
11.	Deteksi Dini, Pencegahan dan Kesiapsiagaan kebakaran	678.375.500	665.398.170	98,09
<b>VI</b>	<b>Program Pembinaan, Pengamanan dan Penegakan Perda</b>	<b>182.364.780</b>	<b>154.511.820</b>	<b>84,73</b>
12.	Penyelidikan, Penyidikan Perda, Pelayanan dan Pembinaan PPNS	108.659.180	82.341.820	75,78
13.	Pembinaan, Pengawasandan Penyuluhan Perda/Perkada	73,705.600	72.170.000	97,92
<b>VII</b>	<b>Program Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>1.422.414.500</b>	<b>1.344.118.500</b>	<b>94,50</b>
14.	Pengamanan Kegiatan Pemerintah daerah	859.844.500	850.813.500	98,95
15.	Pembinaan, Pengendalian dan Penindakan Kamtrantibmas	562.570.000	493.305.000	87,69
<b>VIII</b>	<b>Program Pembinaan Aparatur dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>613.312.000</b>	<b>566.344.800</b>	<b>92,34</b>
16.	Pembinaan Satlinmas	441.232.000	414.350.000	93,91
17.	Pembinaan dan Pengawasan aparatur	172.080.000	151.994.800	88,33
	<b>J U M L A H</b>	<b>9.248.656..329.</b>	<b>8.570.675.130</b>	<b>92,67</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2020. Diharapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis beserta target - targetnya adalah informasi yang di sajikan melalui LAKIP ini.

Secara umum pencapaian kinerja sasaran dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tetapi ada kegiatan yang tidak tercapai dikarenakan adanya kegiatan yang dobel pendanaan yaitu indikator persentase kualitas satlinmas. tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan melalui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2020 yang terdiri atas (satu) Sasaran Indikator Kinerja Utama dan 5 (Lima) Sasaran Strategis

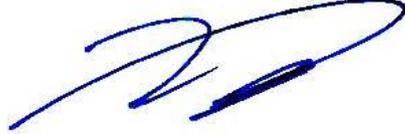
#### **B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA**

Tercapainya pelaksanaan kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan karena adanya peran aktif dari semua aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan didukung oleh sumber dana yang ada. Sementara kelemahan yang dialami diantaranya keterbatasan SDM, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, akan tetapi masih tetap berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020 sudah menunjukkan hasil yang baik, akan tetapi harus tetap dibenahi dari kelemahan-kelemahan yang ada. Strategi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam meningkatkan kinerja diantaranya dengan meningkatkan SDM baik dari segi kuantitas yaitu dengan meminta tambahan pegawai baru, sementara dari segi kualitas, dengan mengikutsertakan dalam Diklat / Bimtek. Selain itu juga meningkatkan sarana dan prasarana untuk

menunjang pelayanan publik dan terus menjaga dan meningkatkan peran aktif dari semua aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta komitmen untuk memelihara ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat pada umumnya.

Plt Kepala Satuan,



Ir. M. FARIED WIDYATMOKO  
NIP. 19680929 199503 1 006